



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI**

**(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

Tahun Sidang	: 2015 - 2016.
Masa Persidangan ke-	: III (tiga).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Kerja.
Dengan	: Kementerian Pemuda dan Olahraga RI.
Hari/Tanggal	: Rabu, 2 Maret 2016.
Pukul	: 13.00 WIB s/d selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Drs. Utut Adianto/Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Kh, S.Sos/Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: <ol style="list-style-type: none">1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan dan Kegiatan Tahun 2015;2. Pemaparan Persiapan Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2016;3. Penjelasan Persiapan PON 2016 Jawa Barat, TAFISA 2016 di Jakarta, keikutsertaan Indonesia dalam Olimpiade Rio de Janeiro 2016, SEA Games 2017 di Malaysia;4. Pemaparan Perkembangan Persiapan Asian Games XVIII 2018; dan5. Lain-lain.
Hadir	: 36 orang dari 54 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Menteri Pemuda dan Olahraga RI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 13.40 WIB oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Drs. Utut Adianto, setelah kuorum tercapai dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Menteri Pemuda dan Olahraga RI serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

A. Laporan Evaluasi Pelaksanaan dan Kegiatan Tahun 2015

1. Komisi X DPR RI menilai bahwa daya serap APBN-P TA 2015 Kemenpora RI per 31 Desember 2015 yang mencapai 83,87% (termasuk yang diblokir sejumlah 227,3 M) atau mencapai 90,67% (tidak termasuk yang diblokir sejumlah 227,3 M) masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya Komisi X DPR RI mendorong Kemenpora RI untuk meningkatkan capaian tersebut pada APBN TA 2016.
2. Komisi X DPR RI mendesak Kemenpora RI untuk menegaskan dan memastikan bahwa pencairan dan realisasi anggaran Program Indonesia Emas (PRIMA) sebesar Rp.645.000.000.000 yang terealisasi sebesar Rp.624.849.044.585 pada APBN TA 2015 sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Terkait realisasi anggaran pada APBN TA 2015, Komisi X DPR RI meminta Kemenpora RI untuk menyampaikan data secara rinci kepada Komisi X DPR RI, khususnya terkait sebaran program kepemudaan, perlangkapan dan pembangunan sarana prasarana olahraga.

B. Pemaparan Persiapan Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2016;

1. Komisi X DPR RI menilai bahwa kesiapan pelaksanaan APBN TA 2016 Kemenpora RI masih membutuhkan pendalaman karena belum menyampaikan laporan secara terinci sampai dengan sub kegiatan. Rincian anggaran tersebut akan digunakan Komisi X DPR RI sebagai bahan kajian untuk melakukan fungsi pengawasan.
2. Terhadap persiapan dan kesiapan pelaksanaan APBN tahun 2016, Komisi X DPR RI mengingatkan Kemenpora RI:
 - a. Agar pelaksanaan APBN tahun 2016 tidak sekedar mengejar daya serap, tetapi pemanfaatan anggaran tersebut harus benar-benar dapat meningkatkan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan serta berdampak langsung terhadap masyarakat.
 - b. Agar memprioritaskan persiapan kegiatan keolahragaan dan kepemudaan seperti di antaranya PON 2016 di Jawa Barat, TAFISA 2016 di Jakarta, Olimpiade Rio de Jeniero 2016 di Brazil, dan Jambore Gerakan Pramuka tahun 2016 di Cibubur.
 - c. Agar mempertimbangkan proporsionalitas anggaran bidang pemuda dan anggaran bidang olahraga.
 - d. Melakukan koordinasi dengan K/L lain yang memiliki program kepemudaan, agar tidak ada program Pemerintah yang tumpang tindih.

C. Penjelasan Persiapan PON 2016 Jawa Barat, TAFISA 2016 di Jakarta, keikutsertaan Indonesia dalam Olimpiade Rio De Jeniero 2016, SEA Games 2017 di Malaysia;

1. Terkait persiapan PON 2016 di Jawa Barat, Komisi X DPR RI mendorong Kemenpora RI untuk mengajukan usulan baru pada APBN-P TA 2016 dalam rangka dukungan tambahan anggaran PON 2016 di Jawa Barat yang saat ini hanya sebesar Rp.100 M.

2. Terkait persiapan penyelenggaraan TAFISA 2016 di Jakarta, Komisi X DPR RI mendorong Kemenpora RI untuk mengajukan usulan baru pada APBN-P TA 2016 dalam rangka dukungan tambahan anggaran TAFISA 2016 di Jakarta yang saat ini hanya sebesar Rp.125 M.
3. Terkait keikutsertaan Indonesia dalam Olimpiade Rio de Janeiro 2016, Komisi X DPR RI meminta Kemenpora RI untuk mengevaluasi kembali permasalahan teknis pendanaan dan pencairan agar kontingen Indonesia dapat berprestasi maksimal dan masuk peringkat 30 besar dengan 2 medali Emas sesuai target RPJMN 2015-2019.
4. Terkait keikutsertaan Indonesia dalam SEA Games 2017 di Malaysia, Komisi X DPR RI mendorong Kemenpora RI untuk meningkatkan koordinasi secara intensif dengan KONI, KOI dan Satlak Prima agar kontingen Indonesia dapat mencapai prestasi yang lebih baik dari SEA Games XXVIII Tahun 2015 di Singapura.

D. Pemaparan Perkembangan Persiapan Asian Games 2018;

1. Komisi X DPR RI berpandangan bahwa Pemerintah Cq: Kemenpora RI belum optimal dalam melakukan persiapan penyelenggaraan Asian Games XVIII 2018. Selanjutnya Komisi X DPR RI memberikan catatan sbb:
 - a. Pemerintah segera menyerahkan rencana induk Asian Games XVIII 2018 termasuk lokasi pembukaan dan penutupan serta cabor-cabor yang akan dipertandingkan di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Sumatera Selatan dan lain-lain
 - b. Perlunya rumusan skema anggaran untuk tahun 2016 sampai tahun 2018 termasuk besaran anggaran dan peruntukannya secara rinci.
 - c. Perlunya payung hukum untuk pembiayaan tahun 2016 sampai tahun 2018 sebagaimana dimaksud poin b di atas.
2. Komisi X DPR RI mendesak pencabutan SK Menpora RI No. 01307 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Kegiatan Keolahragaan PSSI Tidak Diakui, serta mengkaji kembali persyaratan terhadap pencabutan SK tersebut.
3. Dalam upaya mencabut sanksi FIFA terhadap PSSI, maka Komisi X DPR RI meminta Menpora RI untuk menyelesaikan permasalahan pembekuan PSSI selambat-lambatnya bulan April 2016.

E. Lain-lain

1. Komisi X DPR RI meminta Kemenpora RI untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata RI untuk memberikan dukungan terhadap atlet profesional Indonesia sebagai salah satu media promosi kampanye *wonderful* Indonesia, diantaranya dengan dukungan pendanaan terhadap pembalap F1 Rio Haryanto.
2. Komisi X DPR RI meminta Kemenpora RI untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Pariwisata RI untuk menyusun *roadmap* dalam membangun dan mempromosikan wisata olahraga (*Sport Tourism*).
3. Komisi X DPR RI meminta Kemenpora RI untuk menjelaskan secara komprehensif mengenai persiapan Indonesia sebagai tuan rumah MotoGP Tahun 2017.

4. Berdasarkan penjelasan Menpora RI mengenai kelayakan Sdr. Anthony Ray Hargrove (warga Negara Amerika/atlet bola basket) untuk menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), Komisi X DPR RI memberikan pertimbangan untuk menyetujuinya.
5. Terkait pengalihan anggaran renovasi GBK sebesar Rp. 500 M pada APBN TA 2016 dari Kemenpora RI ke KemenPUPR RI akan dilakukan Rapat Kerja tersendiri.
6. Terkait masih diperlukannya pembenahan pranata hukum, Komisi X DPR RI meminta Kemenpora RI untuk melakukan kajian revisi UU N0.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahrgaan Nasional dan UU No 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka selambat-lambatnya bulan Juli 2016.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 18.30 WIB

MENPORA RI,



IMAM NAHRAWI

KETUA RAPAT,



DRS. UTUT ADIANTO